

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan program Pemerintah tentang perlunya peningkatan pendayagunaan aparatur negara menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka pelaksanaan pengawasan merupakan salah satu bagian terpenting.

Aparatur negara yang bersih dan berwibawa adalah aparatur negara yang segala tindak tanduknya dapat dipertanggung jawabkan, baik dilihat dari segi peraturan perundang-undangan maupun moralitis serta nilai-nilai bangsa.

Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa pemerintah menuntut dari aparatnya agar dalam menjalankan tugasnya harus sungguh-sungguh sesuai dengan status dan jabatan yang mereka miliki.

Suatu rencana yang telah ditetapkan tidaklah dapat berjalan dengan lancar bilamana fungsi pengawasan belum terealisasi dengan baik. Sering dijumpai di dalam organisasi, baik swasta maupun pemerintah, kegiatan yang berlangsung tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Para pegawai bekerja tidak lagi mengindahkan aturan-aturan yang ada, dan mereka hadir serta pulang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Untuk mengatasi hal ini, maka dituntut adanya inisiatif setiap pimpinan dari unit-unit organisasi pemerintah agar dapat meningkatkan pelaksanaan pengawasan terhadap para pegawainya.

Pelaksanaan pengawasan dalam suatu organisasi sangat penting, artinya pengawasan itu mampu mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang pada akhirnya akan merugikan organisasi itu sendiri.

Pengawasan sebagai salah satu fungsi administrasi diperlukan untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan penyimpangan dari pada rencana-rencana semula, instruksi-instruksi, sasaran dan sebagainya yang telah ditetapkan. Dengan pengawasan diharapkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin dapat menimbulkan kerugian yang besar dapat dihilangkan atau setidaknya-tidaknya diperkecil. Hal ini berarti dengan adanya pengawasan yang baik, tujuan yang telah ditetapkan akan dapat tercapai dengan cara efektif dan efisien.

Dalam rangka melaksanakan suatu sistem pemerintahan, terutama berjalannya bidang tugas lembaga-lembaga pemerintahan termasuk halnya di Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Langkat, maka sangat diperlukan suatu pelaksanaan pengawasan terutama perihal pelaksanaan pengawasan dalam tujuan meningkatkan efektivitas kerja.

Berdasarkan uraian di atas, serta mengingat akan pentingnya pengawasan di dalam meningkatkan efektifitas kerja suatu organisasi pemerintahan maka penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan melakukan penelitian yang memenuhi syarat dan menerangkan dalam suatu karangan ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul yang dapat dirumuskan sebagai berikut : “Pelaksanaan Pengawasan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Pada Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Kabupaten Langkat”